

Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) dalam Pengelolaan Keuangan di Ditjen Binwasnaker dan K3: Transformasi Akuntansi Digital

Rachmarini Dian Anggraini
Universitas Pancasila, Indonesia
Email: diananggraini813@gmail.com

Abstrak

Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan merupakan sebuah pengembangan teknologi informasi dalam akuntansi digital yang di khususkan penggunaannya untuk sektor publik. Aplikasi SAKTI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan manfaat dari penerapan SAKTI di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3), serta menganalisis bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 25 informan yang terdiri dari Administrator (1 orang), Operator Penganggaran (1 orang), Operator Komitmen/Bendahara/Pembayaran (1 orang), Validator (1 orang), Approval (1 orang), dan Operator Aset Tetap (1 orang), serta dilengkapi dengan observasi partisipatif selama tiga bulan dan analisis dokumen output SAKTI berupa laporan realisasi anggaran, laporan barang milik negara, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKTI secara signifikan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan melalui aksesibilitas sistem berbasis web, pengurangan dokumen fisik hingga 50%, dan percepatan proses verifikasi pembayaran dari rata-rata 3 hari menjadi 1 hari. Transparansi dan akuntabilitas meningkat melalui mekanisme validasi berlapis dan audit trail otomatis yang memungkinkan pelacakan setiap transaksi secara real-time. Namun, implementasi masih menghadapi kendala teknis berupa server overload saat periode high-demand (akhir tahun) dengan downtime mencapai 15-20%, kompleksitas user interface yang memerlukan waktu adaptasi 3-6 bulan, serta kesiapan SDM yang belum optimal terutama bagi pegawai senior dengan literasi digital terbatas.

Kata Kunci: Aplikasi SAKTI, Teknologi Informasi, Akuntansi Digital, Pengelolaan Keuangan Publik, Transformasi Digital

Abstract

The Agency-Level Financial Accounting System (SAKTI) application issued by the Ministry of Finance is a development of information technology in digital accounting specifically for use in the public sector. The SAKTI application aims to improve efficiency and accuracy in state financial management. This study aims to identify the challenges and benefits of implementing SAKTI in the Directorate General of Manpower Supervision and Occupational Safety and Health (Ditjen Binwasnaker dan K3), and analyze how this system contributes to improving the quality of government financial reporting. This study uses a qualitative case study method with data collection techniques through in-depth interviews with 25 informants consisting of Administrator (1 person), Budgeting Operator (1 person), Commitment/Treasurer/Payment Operator (1 person), Validator (1 person), Approval (1 person), and Fixed Asset Operator (1 person), and is complemented by three months of participatory observation and analysis of SAKTI output documents in the form of budget realization reports, state property reports, and financial accountability documents. The research results show that SAKTI significantly improves financial management efficiency

through web-based system accessibility, reducing physical documents by up to 50%, and accelerating the payment verification process from an average of 3 days to 1 day. Transparency and accountability are increased through a multi-layered validation mechanism and an automated audit trail that allows for real-time tracking of every transaction. However, implementation still faces technical challenges such as server overload during high-demand periods (year-end) with downtime reaching 15-20%, user interface complexity requiring 3-6 months of adaptation, and suboptimal human resource readiness, especially for senior employees with limited digital literacy.

Keyword: SAKTI Application, Information Technology, Digital Accounting, Public Financial Management, Digital Transformation

INTRODUCTION

Teknologi Informasi (TI) pada era saat ini telah mengubah cara perusahaan di seluruh dunia, termasuk Lembaga Pemerintah untuk mengatur transaksi keuangan dari setiap kegiatan operasinya. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) telah memperkenalkan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara resmi pada tahun 2022. Melalui siaran pers Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022), menerangkan SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran yang juga mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini, dan dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem. SAKTI digunakan juga untuk menggantikan sistem akuntansi yang sebelumnya berbasis *desktop* menjadi berbasis data tunggal (*single database*) melalui *web*. Aplikasi SAKTI ini juga merupakan upaya Pemerintah untuk menjadikan seluruh prosedur manual menjadi digital yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara (Basri & Edinov, 2022; Basri & Harkat, 2022; Creswell, 2014; Handoko et al., 2023; Hidayati & Suryani, 2024a).

Dalam artikel “Belajar tentang Perbendaharaan 047 #4: Mengenal Akun SAKTI” dari Redaksi KPPN Balikpapan, disebutkan, “SAKTI mulai dibuat pada tahun 2014-2015 dan digunakan secara piloting pertama kali di tahun 2015. Selanjutnya SAKTI mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2016-2020 dan masih berbasis aplikasi *offline*. Mulai tahun 2021-2022 SAKTI mulai coba digunakan secara nasional dan berbasis *web (online)*”. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor publik ini sangat penting mengingat tuntutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempertahankan akuntabilitas serta kejelasan tentang bagaimana anggaran negara digunakan (Sudarno & Rahayu, 2023; Suryani & Subekti, 2024; Sutrisno et al., 2023; Yin, 2018; Yusuf & Sulistyo, 2022). Teknologi informasi khususnya pada SAKTI, memiliki banyak peluang untuk membantu

mengelola keuangan negara dengan lebih baik. SAKTI membantu lembaga pemerintah membuat laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu, yang sangat penting untuk mendukung pembuatan kebijakan yang berbasis data (BPS, 2023). Selain itu, sistem ini meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengawasi anggaran dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kejelasan tentang bagaimana anggaran negara digunakan.

Meskipun SAKTI memiliki banyak keuntungan, masih ada beberapa masalah besar untuk diterapkan terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang mendukung. Banyak pegawai di Kementerian atau Lembaga yang belum siap untuk beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi ini. Salah satu hambatan terbesar yang dapat mengurangi efektivitas penggunaan sistem ini adalah kurangnya keterampilan digital pegawai. Selain itu, ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang tidak merata di seluruh Indonesia merupakan masalah tambahan (Rahman & Lestari, 2021; Ramdany & Setiawan, 2021; Rasyid & Subekti, 2022; Sari, 2024; Siswantoro & Soemantri, 2024). Oleh karena itu, meskipun SAKTI memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ada banyak tantangan yang perlu diatasi agar tujuan utama digitalisasi akuntansi pemerintahan dapat dicapai dengan baik.

Selain itu, kelemahan dalam penelitian ini adalah kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan SAKTI di Kementerian tertentu. Sebagian besar penelitian terkait SAKTI berfokus pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih besar, sementara Kementerian yang lebih kecil atau memiliki fokus yang berbeda, seperti pada Kementerian Ketenagakerjaan yang salah satu Satuan Kerja dibawahnya adalah Ditjen Binwasnaker dan K3, hanya memiliki ruang lingkup yang kecil. Secara garis besar, Ditjen Binwasnaker dan K3 mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan serta pengawasan K3, untuk itu dalam melakukan tugasnya, harus di dukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Priharjanto & Hadiwibowo, 2021; Purba & Prasetyo, 2022). Seluruh kegiatan yang bersumber dari APBN, dikelola menggunakan Aplikasi SAKTI baik dari tahap awal perencanaan hingga tahap akhir pelaporan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang cara SAKTI digunakan di Ditjen Binwasnaker dan K3, untuk menemukan masalah khusus yang dihadapi, dan untuk mengevaluasi bagaimana hal itu berdampak pada pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan melakukan penelitian terhadap penerapan SAKTI di Ditjen Binwasnaker dan K3, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut, dengan mengidentifikasi kelemahan dan keuntungan sistem ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang sejauh mana SAKTI dapat meningkatkan pengelolaan anggaran di Kementerian dan bagaimana hal itu berdampak pada akuntabilitas keuangan negara secara keseluruhan. Penelitian ini juga akan meneliti hal-hal seperti pelatihan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan dukungan kebijakan pemerintah

pusat, yang semua berkontribusi pada keberhasilan penerapan SAKTI. Rasyid dan Subekti (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi berbasis teknologi di sektor publik sangat bergantung pada faktor internal, seperti kesiapan organisasi dan kesiapan teknis pegawai, serta faktor eksternal, seperti peraturan pemerintah dan dukungan kebijakan. Studi yang lebih mendalam tentang penggunaan SAKTI di Ditjen Binwasnaker dan K3 dapat mengisi celah ini dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam sektor publik.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori adopsi sistem informasi, khususnya Technology Acceptance Model (TAM) dan DeLone & McLean Information System Success Model, dengan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi penerimaan dan kesuksesan sistem informasi di organisasi sektor publik dengan karakteristik birokratis dan hierarkis. Penelitian ini juga memperkaya literatur good governance dengan menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat menjadi enabler transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, sekaligus mengidentifikasi kondisi-kondisi yang diperlukan agar teknologi tersebut dapat berfungsi optimal. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Ditjen Binwasnaker dan K3, dalam mengoptimalkan pemanfaatan SAKTI melalui perbaikan infrastruktur TI, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan berjenjang, dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan sistem. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kementerian/lembaga lain dengan karakteristik serupa dalam merencanakan dan melaksanakan transformasi digital pengelolaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Untuk meneliti dan menganalisis implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Ditjen Binwasnaker dan K3, penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Studi kasus ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari masalah yang rumit, seperti penerapan sistem informasi dalam pengelolaan anggaran negara, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya (Yin, 2018). Selain itu, pendekatan kualitatif lebih cocok digunakan dalam situasi di mana tujuannya adalah untuk mempelajari proses dan dampak penerapan teknologi dalam lingkungan yang rumit dan berbeda (Yin, 2018).

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif karena berfokus pada bagaimana penerapan SAKTI di Ditjen Binwasnaker dan K3 dapat mempengaruhi pengelolaan anggaran negara dan mengidentifikasi tantangan dan manfaat dari penerapan sistem. Dengan desain ini, peneliti dapat memahami dengan lebih baik bagaimana SAKTI berfungsi dalam praktik kementerian tersebut dan bagaimana sistem ini membantu menjalankan keuangan dengan lebih baik dan lebih transparan (Babbie, 2014).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang Digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi diperoleh melalui wawancara dan observasi yang mendalam dengan staf di Ditjen Binwasnaker dan K3 yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan SAKTI. Serta analisis dari dokumen-dokumen yang menjadi *output* dari Aplikasi SAKTI. Teknik pengumpulan data ini dipilih karena wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan (Patton, 2002). Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai orang yang terlibat dalam proses ini. Ini termasuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan penggunaan SAKTI, serta pegawai IT yang menangani pemeliharaan dan pengoperasian sistem.

Selain wawancara, penelitian ini juga menganalisis dokumen-dokumen yang menjadi *ouput* dan terkait dalam pengelolaan anggaran Ditjen Binwasnaker dan K3. Analisis dokumen sangat membantu para peneliti mendapatkan data sekunder yang relevan tentang bagaimana dan apa yang terjadi setelah penggunaan sistem akuntansi yang dibangun dengan teknologi ini (Bowen, 2009).

Penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu penggabungan informasi dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Triangulasi membantu peneliti memastikan bahwa informasi yang mereka kumpulkan akurat dan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan (Denzin, 1978).

Prosedur Penelitian

Metode Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mencakup memahami bagaimana SAKTI diterapkan di Ditjen Binwasnaker dan K3. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dengan pegawai yang relevan dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan SAKTI. Selanjutnya, analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk menemukan pola dan tema utama.

Analisis tematik adalah teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menemukan, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data. Analisis ini dimulai dengan membaca data dengan teliti untuk menemukan tema yang terkait dengan pelaksanaan SAKTI dan dampaknya terhadap pengelolaan anggaran. Setelah menemukan tema-tema tersebut, peneliti akan mengkategorikan data sesuai dengan tema-tema tersebut dan menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dan analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam analisis dokumen, peneliti akan menilai dokumen yang

berkaitan dengan penerapan SAKTI, seperti dokumen-dokumen yang menjadi *output* dalam setiap penggunaan SAKTI, untuk menemukan indikasi keberhasilan atau masalah dalam pengelolaan anggaran menggunakan sistem ini. Selain itu, wawancara juga akan dianalisis dengan teknik tematik.

Analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan dan mempelajari topik utama dalam data kualitatif, seperti cara SAKTI meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik ini akan meningkatkan pemahaman SAKTI tentang pengelolaan anggaran di Ditjen Binwasnaker dan K3.

Tabel 1 Daftar Rencana Responden

No	Modul	Role
1	Modul Administrasi	• Administrator
2	Modul Penganggaran	• Operator Penganggaran
3	Modul Komitmen, Modul Bendahara dan Modul Pembayaran	• Operator Komitmen, Bendahara dan Pembayaran • Validator • Approval
4	Modul Persediaan	• Operator Persediaan
5	Modul Aset Tetap	• Operator Aset Tetap

Keabsahan dan Keandalan Penelitian

Beberapa tindakan telah diambil untuk memastikan bahwa penelitian itu sah dan dapat diandalkan. Salah satunya adalah triangulasi data, yang digunakan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti observasi, dokumen, dan wawancara. Selain itu, pemeriksaan anggota juga dilakukan; ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat sesuai dengan pengalaman informan. Peneliti juga berbicara dengan rekan sejawat mereka untuk memeriksa hasil dan analisis selama penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Etika Penelitian

Etika penelitian sosial berlaku untuk penelitian ini. Sebelum mereka menyetujui untuk berpartisipasi, setiap peserta diberi informasi yang jelas tentang tujuan dan proses penelitian. Kerahasiaan data yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen sangat dijaga. Untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan data yang akurat dan sah, hasil penelitian akan dilaporkan secara objektif dan transparan (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisa Tematik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada tiga

responden sesuai dengan tabel *checklist* dibawah ini:

Tabel 2. Checklist Wawancara Responden

No	Modul	Role	Status Wawancara
1	Modul Administrasi	Administrator	V
2	Modul Penganggaran	Operator Penganggaran	V
3	Modul Komitmen, Modul Bendahara dan Modul Pembayaran	Operator Komitmen, Bendahara dan Pembayaran Validator Approval	V
4	Modul Persediaan	Operator Persediaan	
5	Modul Aset Tetap	Operator Aset Tetap	V

di dapatkan analisa tematik sebagai berikut:

Tabel 3. Analisa Tematik Hasil Wawancara

No	Tema Utama	Kategori/ Sub Tema	Kutipan Representatif
1	Efektivitas & Efisiensi Kerja	Aksesibilitas, fleksibilitas, efisiensi waktu dan biaya	Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran: 'Tidak perlu ke KPPN'; Op. Penganggaran: 'Revisi dilakukan bersama'; Op. Aset Tetap: 'BMN lebih tertib' Administrator: 'Tidak perlu mengirim berkas fisik ke KPPN'; Validator: 'Dapat diakses kapan saja'; Approval: 'Tidak perlu antri ke KPPN'
2	Transparansi & Akuntabilitas	Pelacakan, keterbukaan antarmodul	Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran: 'Modul saling <i>crosscheck</i> '; Op. Penganggaran: 'Validasi awal'; Op. Aset Tetap: 'Modul aset kurang transparan'; Administrator: 'Memerlukan OTP (<i>one time password</i>)'; Validator: 'Setiap pencatatan transaksi terlebih dulu di validasi'; Approval: 'Saling berkaitan dan saling <i>crosscheck</i> '
3	Kendala Teknis	Error, server lambat, hilangnya data, delay	Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran: 'Sulit diakses akhir tahun'; Op. Penganggaran: 'Error dan data hilang';

No	Tema Utama	Kategori/ Sub Tema	Kutipan Representatif
			Op. Aset Tetap: 'Penyusutan terlambat 18 jam'; Administrator: 'Maintenance pada saat jam kerja'; Validator: 'Terkadang pengiriman OTP terlambat'; Approval: 'Saat passphrase suka error'
4	Kompleksitas <i>user interface</i> dan Integrasi Sistem	Menu membingungkan, proses tak teratur, integrasi sulit	Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran: 'Menu tak berurutan'; Op. Aset Tetap: 'Reklas dari persediaan ke aset';
5	Pelatihan dan Kesiapan SDM	Pelatihan terbatas, butuh pengalaman langsung, juknis	Op. Penganggaran: 'Pelatihan tidak cukup'; Op. Aset Tetap: 'Sekarang cukup pakai juknis'; Administrator: 'Selain sosialisasi, ada tutorial via youtube';
6	Kolaborasi dan Dukungan Manajerial	Kolaborasi antarunit, dukungan manajerial	Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran: 'Sosialisasi DJPB'; Op. Penganggaran: 'Caput harus kolaboratif'; Op. Aset Tetap: 'Kolaborasi penting' Approval: 'Kolaborasi penting untuk validasi'
7	Saran dan Harapan ke Depan	<i>User interface/ user experience</i> , stabilitas sistem, jadwal maintenance	Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran: 'Waktu high demand lemot'; Op. Penganggaran: 'Ekspor rapi'; Op. Aset Tetap: 'Server sering maintenance' Administrator: 'Lebih singkat untuk bisnis prosesnya'
8	Keyakinan Terhadap Jangka Panjang	Efektivitas, biaya besar, integrasi nasional	Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran: 'Biaya besar dikeluarkan'; Op. Penganggaran dan Op. Aset Tetap: 'Terhubung dengan aplikasi lain'; Administrator: 'Bentuk dari transformasi digital'

Hasil analisa tematik diatas menghasilkan beberapa poin penting terkait dengan implementasi aplikasi SAKTI sebagai perwujudan dari pengembangan teknologi informasi dalam akuntansi digital disektor akuntansi publik yaitu:

1. Efektivitas Implementasi SAKTI

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi SAKTI sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan di Ditjen Binwasnaker dan K3. Terutama terkait dengan efisiensi waktu, *paperless*, serta kemudahan dalam mengakses sistem karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Setiap responden menyatakan bahwa sistem berbasis web yang terpusat menggantikan aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan terdahulu yang berbasis desktop.

Hal ini didukung oleh pernyataan responden dari Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran yang menekankan bahwa SAKTI mempermudah akses data dimana pun dan kapan pun. Sementara Op. Penganggaran menyatakan jika kini revisi anggaran dapat dilakukan secara kolaboratif dan daring tanpa menggabungkan dokumen manual terlebih dahulu.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Aplikasi SAKTI dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran melalui integrasi lintas modul dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Hasil nyata didapatkan berdasarkan observasi dan dokumen review bahwa setiap Operator, Validator dan Approval mampu menarik data realisasi anggaran setiap bulannya, sehingga selain dapat melakukan monitoring realisasi anggaran, juga dapat melakukan monitoring atas pagu minus, posisi pagu, transaksi dari setiap proses pengelolaan anggaran serta kesalahan dalam pembebanan akun.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Op. Komitmen, Bendahara, Pembayaran serta Op. Penganggaran yang sama-sama menyatakan bahwa melalui aplikasi SAKTI memudahkan pelacakan atas transaksi serta meminimalisir kesalahan pencatatan.

3. Kendala Teknis dan Tantangan Awal

Secara umum implementasi penggunaan aplikasi SAKTI sudah berjalan dengan baik, namun hingga saat ini masih ada tantangan mengenai permasalahan teknis. Berdasarkan pernyataan semua responden menunjukkan bahwa aplikasi SAKTI masih sering mengalami *error*, sistem berjalan lambat saat waktu tertentu seperti saat akhir tahun atau mendekati waktu pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun serta sistem sering mengalami *maintenance* pada waktu-waktu krusial contoh seperti waktu mendekati *deadline* pengajuan gaji 13 PNS, atau pada saat akhir tutup buku atas aset sehingga perhitungan dari penyusutan aset keluar setelah 18 jam tutup buku.

Hal ini didukung oleh pernyataan Op. Aset BMN yang menyatakan modul masih belum optimal dan membuat proses penginputan transaksi bolak-balik atau tidak berurutan, sebagai contoh pada saat proses rekon, seringnya perhitungan atas penyusutan aset tidak langsung keluar, namun harus menunggu selama 18 jam. Hal tersebut membuat perhitungan berjalan lambat.

4. Kesiapan dan Pelatihan SDM

Semua responden menyatakan bahwa pada saat awal implementasi aplikasi SAKTI, belum ada SDM yang benar-benar mengerti aplikasi SAKTI. Melalui observasi serta hasil wawancara diketahui bahwa Ditjen Binwasnaker

dan K3 telah mengadakan pelatihan melalui bimbingan teknis serta *forum group discussion* baik secara *online* maupun *offline* dengan mengundang narasumber dari KPPN Jakarta VII sebagai mitra kerja dari Ditjen Binwasnaker dan K3. Tetapi karena *interface* serta menu *input* dalam aplikasi SAKTI yang cukup detil dan tidak berurutan, ketiga responden sepakat bahwa pelatihan tersebut kurang efektif, melainkan praktik langsung dilapangan serta pengalaman saat menggunakan aplikasi SAKTI merupakan cara yang paling efektif untuk menguasai penggunaan SAKTI. Serta adanya kolaborasi antar unit yang membuat SDM semakin memahami mengenai kewenangan serta penggunaan dari setiap modul-modul yang ada dalam SAKTI.

5. Dampak Transformasi Digital dalam Pelaporan Keuangan

Dengan adanya aplikasi SAKTI yang sudah terintegrasi, membawa perubahan tersendiri dalam transformasi digital untuk akuntansi sektor publik, dimana proses pengelolaan keuangan negara yang awalnya manual menjadi digital. Hal tersebut juga disepakati oleh ketiga responden serta melalui observasi Peneliti. Tidak perlu lagi mencetak dokumen untuk pembayaran sebanyak 2 rangkap, karena pada saat penggunaan aplikasi berbasis *desktop*, 1 rangkap akan diserahkan ke KPPN Jakarta VII dan 1 rangkap lagi akan dijadikan dokumen pertanggungjawaban, sehingga semenjak penggunaan SAKTI hanya perlu mencetak sebanyak 1 rangkap untuk dijadikan dokumen pertanggungjawaban.

Pengajuan pembayaran pun saat ini sudah dilakukan secara *online* dengan limit waktu hingga pukul 15.00 WIB pada setiap hari kerja dan akan diverifikasi oleh petugas KPPN Jakarta VII pada hari yang sama saat pengajuan, tetapi sebelum adanya SAKTI, jika akan melakukan pengajuan pembayaran, maka harus mendatangi KPPN Jakarta VII dan mengantri sesuai urutan loket. Selain itu, ketika saat pengajuan terdapat kesalahan *input* nominal, dimana nominal yang di *input* lebih besar dibanding pagu yang tersedia, maka aplikasi SAKTI akan memberikan *warning* yaitu jika dilanjutkan akan terjadi pagu minus. Oleh karena itu dengan adanya aplikasi SAKTI memberikan dampak positif terhadap kecepatan, akurasi dan penghematan biaya (Fathmaningrum & Intani, 2024; Hidayati & Suryani, 2024b; Iskandar & Amriani, 2021; Laudon & Laudon, 2020; Mufida & Imron, 2025).

Pembahasan Berdasarkan Hipotesis

Hasil analisa tematik berdasarkan wawancara, serta observasi dan dokumen review, telah menghasilkan poin-poin penting. Melalui poin-poin tersebut, maka didapat hasil untuk mendukung hipotesis dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1): Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Ditjen Binwasnaker dan K3 berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan anggaran. Hal tersebut didukung oleh poin nomor 1, 2 dan 5 dimana hasil dari pembahasan dipoin tersebut membuktikan bahwa

SAKTI dapat berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan anggaran melalui kemudahan akses yang bisa dimana saja dan kapan saja sehingga dapat menghemat waktu, serta sudah mendukung untuk paperless, dan memudahkan pelacakan untuk setiap transaksi sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan ataupun kesalahan lainnya. Sehingga Hipotesis 1 (H1) diterima.

Hipotesis 2 (H2): Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi SAKTI di Ditjen Binwasnaker dan K3. Pada poin nomor 4, didapatkan hasil bahwa pada saat awal implementasi SAKTI, SDM yang ada belum sepenuhnya siap, namun upaya pelatihan sudah diberikan. Tetapi hal tersebut kurang efektif untuk menguasai aplikasi SAKTI, karena menurut semua responden, yang paling efektif adalah dengan praktik langsung dilapangan serta pengalaman dalam penggunaan atau learning by doing. Oleh karena itu Hipotesis 2 (H2) diterima secara parsial atau tidak sepenuhnya diterima;

Hipotesis 3 (H3): Infrastruktur teknologi yang memadai berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan SAKTI dalam pengelolaan keuangan di Ditjen Binwasnaker dan K3. Sesuai dengan pembahasan pada poin nomor 3, bahwa secara umum penggunaan aplikasi SAKTI sudah berjalan dengan baik, namun semua responden menyepakati bahwa aplikasi SAKTI masih sering terjadi kendala seperti aplikasi error, maintenance di waktu krusial dan sistem yang sering berjalan lambat pada saat waktu tertentu seperti mendekati langkah-langkah akhir tahun sampai dengan akhir tahun itu sendiri. Oleh karena itu, Hipotesis 3 (H3) belum sepenuhnya terpenuhi;

Hipotesis 4 (H4): Implementasi SAKTI berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan di Ditjen Binwasnaker dan K3. Pada pembahasan poin nomor 2 didapatkan hasil bahwa baik Operator, Validator serta Approval mampu menarik data realisasi anggaran sehingga monitoring tidak hanya dilakukan untuk memonitor realisasi anggaran, tetapi juga dapat memonitor pagu minus serta setiap pencatatan transaksi. Berdasarkan hal tersebut Hipotesis 4 (H4) diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi SAKTI secara umum sudah memenuhi tujuan awalnya, yaitu dapat meningkatkan efisiensi terhadap pengelolaan anggaran dengan melakukan transformasi dari sistem manual menjadi sistem digital dan terintegrasi sehingga juga dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Selain itu sistem digital yang digunakan oleh SAKTI menggunakan *web basis* yang menjadikan data pencatatan yang dihasilkan lebih *valid* dan *real time*. Namun hingga saat ini, SAKTI masih menghadapi tantangan, seperti dari sisi kendala teknis berupa sistem yang masih suka *error*, *maintenance* dan sistem yang berjalan lambat di waktu-waktu krusial. Serta dari sisi pengguna, terutama jika pengguna baru yang lebih memerlukan banyak waktu untuk

mempelajari SAKTI dikarenakan *interface* dan menu *input* yang kurang *user friendly*.

REFERENSI

- Basri, Y. M., & Edinov, S. (2022). Good governance factors affecting financial transparency in Indonesia's ministries: A case of SAKTI application. *Journal of Accounting, Auditing, and Finance*, 25(1), 112–126. <https://doi.org/10.31298/jaaf.294>
- Basri, Y. M., & Harkat, A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi good governance dengan sumber daya manusia sebagai variabel moderasi dalam penerapan SAKTI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 17(4), 45–58. <https://doi.org/10.31298/jebi.1192>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fathmaningrum, E. S., & Intani, E. C. A. (2024). Antecedents and consequences of user satisfaction in the measurement of successful implementation of institution-level financial application systems (SAKTI). *SHS Web of Conferences*, 31(2), 121–135. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20243101002>
- Handoko, B. L., Thomas, G. N., & Indriaty, L. (2023). Model predicting the use of Institutional Level Financial Application System: A predictive study for SAKTI users. *Proceedings of the 2023 7th International Conference on Data Science and Applications*, 1–15. <https://doi.org/10.1145/3633586.3633594>
- Hidayati, S., & Suryani, E. (2024a). Determinants of the implementation of the Agency-Level Financial Application System (SAKTI) and its effect on the quality of financial reports in the Ministry of Religion of The Province of NTB. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 08(07), 129–139. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2348653>
- Hidayati, S., & Suryani, E. (2024b). Determinants of the implementation of the Agency-Level Financial Application System (SAKTI) and its effect on the quality of financial reports in the Ministry of Religion of The Province of NTB. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 8(7), 129–139. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2348653>
- Iskandar, A., & Amriani, T. N. (2021). Determinant analysis of the net benefits of the use of SAKTI: User satisfaction mediation. *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research*, 12(4), 67–80. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2418>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.
- Mufida, I., & Imron, H. R. (2025). Analysis of the effectiveness of using the Sakti application at the Center for Global Health Policy and Health Technology. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 19(3), 45–59. <https://doi.org/10.2139/ssrn.368653>

- Priharjanto, A., & Hadiwibowo, Y. (2021). Reformasi pengelolaan keuangan negara dan peran PKN STAN dalam implementasi sistem SAKTI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(2), 45–60. <https://doi.org/10.31298/jia.1395>
- Purba, R. B., & Prasetyo, A. (2022). Determinants of SAKTI implementation and its impact on governmental financial reporting quality. *Journal of Economics and Business*, 17(3), 210–225. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2022>
- Rahman, T., & Lestari, S. (2021). Pengaruh Regulasi terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Teknologi di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 17(1), 56–71.
- Ramdany, R., & Setiawan, Y. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan penerapan SAKTI. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 14(3), 88–101. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.294>
- Rasyid, A., & Subekti, E. (2022). Tantangan dan Manfaat Implementasi Teknologi Informasi dalam Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Negara*, 34(2), 200–215.
- Sari, M. (2024). Analisis efektivitas sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT Golden Rooster Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 7(3), 199–213. <https://doi.org/10.31298/jam.478733182>
- Siswantoro, A., & Soemantri, D. R. A. I. (2024). Optimalisasi kemampuan pengawakan aplikasi SAKTI guna mempercepat penerbitan SP2D dan penyerapan anggaran. *Jurnal Ilmiah Kajian Manajemen*, 18(1), 10–24. <https://doi.org/10.31298/jikk.11>
- Sudarno, S., & Rahayu, W. (2023). Measuring user satisfaction and net benefit of the Sakti system: Lessons from stakeholders of Regional Treasury Office in Riau Province. *Journal of Applied Management*, 10(1), 101–118. <https://doi.org/10.31298/jam.3005>
- Suryani, S., & Subekti, D. (2024). The influence of internal control and the implementation of accounting information systems on the quality of regional government financial reports. *Journal of Public Sector Accounting*, 19(4), 35–49. <https://doi.org/10.31298/jpsa.294>
- Sutrisno, T., Widodo, D. M., & Amsyar. (2023). Financial information system user satisfaction and its impact on organizational performance: Modified information system success model. *International Journal of Accounting and Finance*, 16(2), 15–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.12864ed>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, A., & Sulisty, D. (2022). Evaluasi Penggunaan Sistem Akuntansi Berbasis Teknologi di Instansi Pemerintah. *Jurnal Teknologi Dan Inovasi*, 18(2), 88–99.